

# Kontradiksi Perilaku Republik Rakyat China di Asia Tenggara: Geopolitik dan Kepentingan Nasional (*The Contradictions of the Behavior of the People's Republic of China in Southeast Asia: Geopolitics and the National Interest*)

Arif Nugraha<sup>1\*</sup>, Obsatar Sinaga<sup>2</sup>, Windy Dermawan<sup>3</sup>

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat<sup>1\*,2,3</sup>

[arif19001@mail.unpad.ac.id](mailto:arif19001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>\*, [obsatar.sinaga@unpad.ac.id](mailto:obsatar.sinaga@unpad.ac.id)<sup>2</sup>, [windy.dermawan@unpad.ac.id](mailto:windy.dermawan@unpad.ac.id)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 23 Januari 2023  
Revisi 1 pada 30 Januari 2023  
Revisi 2 pada 01 Februari 2023  
Disetujui pada 07 Februari 2023

## Abstract

**Purpose:** This study will explain the People's Republic of China's (PRC) national interest through international relations activities in the Southeast Asian region. Activities that occur between PRC and states in Southeast Asia are cooperation and conflict at the same time. One form of cooperation that occurs between the PRC and countries in Southeast Asia is the Belt and Road Initiatives (BRI) mega project. Meanwhile, a territorial dispute in the South China Sea is one form of conflict that arises between the PRC and states in Southeast Asia.

**Methodology:** The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. This study will use the concepts of geopolitics and national interests as a research knife to explain the importance of the Southeast Asian region to the PRC, China's behavior in the Southeast Asia region, and PRC intentions.

**Results:** Southeast Asia is of great importance to PRC national interests. The strategic location, natural resources, and countries in the region have the potential to fulfill PRC national interests. PRC has both cooperative and conflict relations with countries in Southeast Asia. Bilateral and multilateral cooperation between PRC and Southeast Asian countries has positively impacted both sides. One form of collaboration between the PRC and Southeast Asian countries is the BRI, and one conflict is the dispute in the South China Sea. Good relations are not a guarantee of avoiding a conflict and vice versa. Ultimately, the state will make a rational choice that will produce a decision or policy that can accommodate its national interests.

**Keywords:** *People's Republic of China, Southeast Asia, Belt and Road Initiatives, South China Sea.*

**How to Cite:** Nugraha, A., Sinaga, O., Dermawan, O. (2022). Kontradiksi Perilaku Republik Rakyat China di Asia Tenggara: Geopolitik dan Kepentingan Nasional. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 101-112.

## 1. Pendahuluan

Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat China (selanjutnya akan ditulis RRC) pada pemerintahan Deng Xiaoping menghantarkan RRC pada fenomena *Rising of China* pada abad 21 ini (Wasserstrom, 2010; Shenkar, 2005). RRC mengalami beberapa periode evolusi, seperti ketergantungan pada Uni Soviet (sekarang Rusia), isolasi mutlak, dan membuka pintu untuk hubungan internasional (P. Sun & Heshmati, 2010, p. 5). Tujuan dari reformasi ini bukanlah untuk meninggalkan sosialisme tetapi untuk membuatnya bekerja lebih baik, secara substansial meningkatkan peran mekanisme pasar dalam sistem dan mengurangi kontrol langsung negara (Worden, Savada, & Dolan, 1987). Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh RRC ditentukan dalam *Third Plenary Session of the*

*Party's 11th Central Committee*, dimana hasil dari sidang tersebut adalah menggantikan tujuan utama perjuangan kelas dengan modernisasi dan pembangunan, sebuah program yang disebut "Sosialisme dengan karakteristik RRC"(Keo, 2020, p. 35).

Reformasi ekonomi yang dilakukan RRC tidak hanya fokus terhadap reformasi dalam negeri, namun juga hubungan luar negeri, pada Desember 1978, Deng mengumumkan kebijakan baru, *open door policy*, kebijakan dimana RRC membuka pintu interaksi dengan aktor internasional yang ingin melakukan kerjasama dengan RRC (Sung, 1991, p. 7). Pada saat melakukan reformasi ekonomi, RRC menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, secara resmi menolak hubungan yang terlalu dekat dengan Amerika Serikat (AS) atau Uni Soviet (sekarang Rusia). Tujuan dari kebijakan ini adalah menjaga perdamaian dunia, menentang segala bentuk hegemoni, dan mencapai modernisasi ekonomi di dalam negeri (Worden et al., 1987). RRC membutuhkan lingkungan internasional yang damai sehingga sumber daya yang memadai dapat diakses RRC untuk kepentingan pembangunan. Reformasi ekonomi adalah kekuatan pendorong dibalik partisipasi RRC yang semakin aktif dalam urusan dunia, dicontohkan oleh kebijakannya yang terbuka terhadap dunia luar, yang mana dapat memperluas hubungan ekonomi RRC dengan aktor internasional lainnya. Oleh karena itu, RRC telah bergabung dengan banyak organisasi internasional, dan membuat hubungan diplomatik dengan banyak negara, hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri RRC yang disebut "*independent foreign policy of peace*" (Worden et al., 1987).

Salah satu bentuk implementasi RRC untuk memperluas hubungannya dengan negara lain adalah dengan membuat kerjasama multilateral. RRC membuat rencana pembangunan jalur perdagangan antar negara dan kawasan. Kerjasama multilateral tersebut dinamakan *Belt and Road Initiative's* (BRI). BRI merupakan sebuah misi yang diinisiasikan oleh Xi Jinping, presiden RRC. BRI adalah inisiasi yang mencoba untuk menghidupkan kembali gairah ekonomi di Jalur Sutera. Rencana RRC untuk kembali membuka Jalur Sutera sebagai jalur perdagangan antar negara dan kawasan. BRI pertama kali dipresentasikan melalui ASEAN (Wahyudi & Ayunindien, 2022). Presiden Xi Jinping melakukan pidato pada kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2013. RRC mengusulkan untuk memperkuat kerja sama maritim dengan negara-negara anggota ASEAN dengan memanfaatkan Dana Kerja Sama Maritim RRC-ASEAN yang dibentuk oleh pemerintah RRC dan dengan giat mengembangkan kemitraan maritim dalam upaya bersama untuk membangun Jalur Sutera Maritim Abad ke-21 ("Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament," 2013).

BRI menawarkan pembangunan infrastruktur transportasi, baik transportasi darat seperti kereta api, laut seperti pelabuhan laut, yang tujuannya untuk memperlancar arus perdagangan antara RRC, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika. RRC juga menekankan kerja sama ekonomi melalui peningkatan hubungan dagang seperti pengurangan hambatan dagang, hingga membentuk blok perdagangan baru (Suropati, Sulaiman, & Montratama, 2016, p. 113). RRC membagi BRI kedalam 6 koridor internasional. Untuk ASEAN koridor internasional tersebut diberi nama *China-Indochina Peninsular Economic Corridor* (CIPEC). CIPEC melintasi Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia ("China-Indochina Peninsula Economic Corridor," 2017).

ASEAN menjadi aktor internasional pertama yang RRC undang untuk ikut serta dalam BRI. Bukan tanpa sebab, ASEAN mempunyai peranan penting dalam keberhasilan BRI, hal ini dikarenakan faktor geografis, mengingat salah satu jalur BRI melalui beberapa negara anggota ASEAN (CIPEC). ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama antara 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja) ("Tentang ASEAN," 2021). ASEAN memiliki 3 (tiga) komunitas untuk menunjang kepentingan paranegara anggota yaitu, *ASEAN Political Security Community* (APSC), *ASEAN Economic Community* (AEC), *ASEAN Socio Cultural Community* (ASCC) ("Our Communities," 2021). Hubungan RRC dengan negara-negara di Asia Tenggara (terutama negara anggota ASEAN) berjalan sangat dinamis. Dimulai pada tahun 1991 ASEAN dan RRC memulai proses dialog, dan pada tahun 1996 RRC menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Pada tahun yang sama, diadakan KTT informal ASEAN-RRC pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana

para pemimpin kedua belah pihak memutuskan untuk menciptakan kemitraan berorientasi untuk bertetangga yang baik dan saling percaya antara ASEAN dan RRC ("ASEAN-China Relations," 2020). RRC secara aktif melibatkan diri dalam berbagai lembaga yang dipimpin ASEAN termasuk ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN *Plus One* (RRC), ASEAN *Plus Three* (RRC, Jepang, Korea Selatan), dan *East Asia Summit*.

Meskipun RRC mempererat hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara dengan berbagai keikutsertaan RRC dalam lembaga ASEAN, realitanya RRC masih memiliki konflik yang belum terselesaikan. Konflik perbatasan yang dimaksud adalah konflik di Laut China Selatan (LCS). Konflik perbatasan maritim ini dimulai ketika RRC mengklaim sebagian besar wilayah LCS melalui *Nine Dash Line* (NDL) (Lumbanrau & Kusumadewi, 2016). Klaim RRC atas LCS melalui NDL berdasarkan pada latar belakang sejarah RRC kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Dampak dari klaim RRC tersebut menyebabkan konflik dengan negara-negara yang berada di sekitar wilayah tersebut. Setidaknya ada 5 negara anggota ASEAN yang memiliki konflik perbatasan dengan RRC di LCS yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam (Lihat **Gambar 1**).



Gambar 1. Nine Dash Line RRC di Laut China Selatan (Sumber: Hoskin, 2019)

Sengketa teritorial di LCS ini diawali oleh klaim RRC atas Kepulauan Pratas, Bank Macclesfield, dan Kepulauan Paracel dan Spratly di wilayah perairan LCS, yang dikembalikan oleh Jepang setelah Perang Dunia II (Lihat **Gambar 1**). Oleh karena itu, untuk mempertahankan teritorinya di pulau-pulau tersebut, RRC mengeluarkan batas-batas terhadap teritori tersebut menggunakan NDL, yang dimulai pada tahun 1953 ("Timeline: China's Maritime Disputes 1895 – 2020," 2020). Dampak atas adanya NDL di LCS, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia secara resmi memprotes penggunaan garis NDL RRC tersebut sebagai klaim di LCS (Esplanada, 2011). Hingga pada akhirnya LCS menjadi wilayah yang diperebutkan banyak pihak, serta mengakibatkan terjadinya konflik militer antara RRC dengan negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa di LCS ("Timeline: China's Maritime Disputes 1895 – 2020," 2020).

Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan, penelitian ini akan membahas lebih lanjut apa yang menjadi kepentingan RRC di Asia Tenggara, khususnya dengan negara-negara anggota ASEAN yang menyebabkan terjadinya kontradiksi hubungan antara RRC dengan negara-negara di Asia Tenggara. Mengingat adanya dua sisi yang RRC tampilkan dalam interaksi hubungan luar negerinya dengan negara-negara di Asia Tenggara/ASEAN, disatu sisi berbentuk kerjasama namun di sisi yang lain berbentuk konfliktual. Penulis akan mencoba mencari benang merah antara BRI yang bersifat kerjasama dengan konflik teritorial di LCS antara RRC dan beberapa negara anggota ASEAN, sehingga pada nantinya akan menjelaskan apa yang menjadi kepentingan RRC di kawasan Asia Tenggara.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **2.1 Geopolitik**

Untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan RRC dalam BRI maupun klaimnya di LCS penulis akan menggunakan pendekatan geopolitik. Geopolitik memiliki kaitan erat dengan geografi. Fokus geopolitik tidak hanya diarahkan pada geografi secara fisik dalam maknanya yang konvensional, melainkan juga menekankan pada geografi manusia (Flin, 2006, p. 1). Geografi manusia yang dimaksud adalah studi mengenai organisasi kegiatan manusia secara spasial, bagaimana makna geografis yang merupakan sebuah wilayah berkaitan dengan aktifitas manusia serta bagaimana hubungan dan interaksi antar-wilayah dapat terjadi. Geopolitik sangat terkait dengan tempat atau wilayah karena semua kegiatan manusia selalu dilatarbelakangi oleh tempat-tempat tertentu. Terdapat kaitan erat antara tempat dan kegiatan manusia, segala pengalaman manusia dapat dipandang sebagai cerminan dari tempat mereka berada atau tinggal. Apa yang dilakukan, disadari, dipikirkan, dan diketahui seseorang dipengaruhi oleh tempat dimana mereka tinggal (Flin, 2006, pp. 2-3). Menurut Doreen Massey, tempat memiliki tiga karakteristik utama (Massey, 2006, pp. 8-9). Pertama, tempat merupakan hasil dari aktifitas manusia. Fungsi, institusi, dan ciri-ciri yang dimiliki oleh tempat ditentukan oleh manusia. Dengan kata lain, tempat merupakan konstruksi sosial. Kedua, tempat bersifat dinamis. Bagaimana manusia beraktifitas, berpikir, dan berkeinginan dapat berubah seiring waktu, sehingga tempat juga dapat ikut berubah. Ketiga, tempat hanya dapat dipahami sepenuhnya melalui interaksinya dengan tempat lain, sejalan dengan pengertian geografi manusia.

Geopolitik menjadi panduan untuk memberi label dengan menggunakan deskripsi geografis, metafora, maupun kerangka tertentu terhadap suatu wilayah atau tempat (Dodds, 2007, p. 4). Label-label tersebut dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu dan memiliki pengaruh terhadap bagaimana tempat-tempat dibayangkan dan dipersepsikan (dikonstruksi), atau dalam kata lain label-label tersebut dapat membentuk identitas suatu tempat (Dodds, 2007, p. 8). Dapat disimpulkan bahwa geopolitik mendasarkan makna yang dibentuk pada konteks tertentu yang disematkan pada tempat tertentu. Konteks yang dimaksud adalah konteks politik yang dibentuk dengan tujuan memenuhi suatu kepentingan. Konteks tersebut diberikan pada suatu tempat dengan menggunakan label-label yang memunculkan gambaran tertentu. Diimplementasikan dengan tepat, konteks politik yang disematkan pada tempat geografis dapat melegitimasi dan menjustifikasi pengambilan kebijakan, karena pemahaman kultural khusus mengenai tempat dan komunitas dapat menggerakkan baik pembuat kebijakan maupun opini publik (Dodds, 2007, p. 10).

Berdasarkan pemberian makna dan pelabelan tersebut muncul asosiasi tempat tertentu dengan identitas tertentu. Interpretasi manusia atau dalam konteks *paper* ini adalah aktor internasional terhadap tempat, konteks geografis, dan label-label yang diberikan terhadapnya bersifat tidak baku dan dapat berubah karena masing-masing aktor memiliki konsep saintifik, filosofis dan teleologi yang beragam. Dengan kata lain, karena masing-masing aktor mencitrakan dirinya dengan berbeda-beda, persepsi mengenai lingkungan aktor juga memiliki variasi (Kristof, 1960: 28). Perbedaan dan persamaan persepsi aktor dalam konteks geografis menjadi salah satu dasar motivasi dalam membuat sebuah kebijakan.

### **2.2 Kepentingan Nasional**

Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan yang dimiliki suatu negara dalam berhubungan dengan negara lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976, p. 247). Kebutuhan dalam konteks kepentingan nasional adalah apa yang harus dipenuhi oleh suatu negara, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dicapai meskipun tidak terlalu dibutuhkan. Kepentingan nasional bukan hanya sekedar teori atau konsep abstrak. Kepentingan nasional memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan politik luar negeri. Maka dari itu, kepentingan nasional dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan luar negeri suatu negara (Morgenthau, 1952, p. 972). Lebih lanjut, Nuechterlein berpendapat bahwa ada empat aspek kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aspek-aspek tersebut antara lain, pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi (Nuechterlein, 1976, p. 248). Morgenthau juga menyatakan bahwa ada tiga hal utama yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari kepentingan nasional yaitu, wilayah, budaya, institusi politik (Morgenthau, 1952, p. 972). Berdasarkan kerangka

konseptual yang penulis gunakan pada tulisan ini maka kerangka penelitian pada tulisan ini akan berfokus bagaimana persepsi RRC terhadap inisiasi BRI dan juga klaim RRC di Laut China Selatan melalui sudut pandang geopolitik, yang dimana aspek-aspek tersebut akan menjelaskan kebijakan RRC melalui BRI dan klaim di LCS, yang pada nantinya kebijakan-kebijakan tersebut akan menjelaskan apa yang menjadi kepentingan RRC di kawasan Asia Tenggara.

### **3. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell(2007), metode penelitian kualitatif menekankan pada proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis, ke pandangan dunia melalui lensa teoritis, dan pada prosedur yang terlibat dalam mempelajari masalah sosial. Penelitian kualitatif ini dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoritis yang mendefinisikan masalah yang akan diteliti yaitu terjadinya kontradiksi dalam perilaku PRC dalam melakukan hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan informasi dengan berbagai tipe, seperti dokumen, buku, sumber dari internet dan catatan.

### **4. Analisis**

Sebelum membahas kepentingan RRC di Asia Tenggara, penting untuk mengetahui apa yang terjadi di Laut China Selatan dan bagaimana bentuk kerjasama multilateral melalui BRI pada umumnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, bagian analisis akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, bagian pertama menjelaskan klaim RRC di LCS, kedua menjelaskan BRI sebagai sebuah kerjasama multilateral yang diusung RRC, dan terakhir adalah korelasi atau benang merah antara konflik klaim di LCS dan posisi kerjasama BRI di kawasan Asia Tenggara.

#### **4.1 Klaim RRC di Laut China Selatan (LCS).**

Sengketa perbatasan wilayah dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh RRC sejak pertama kali RRC berdiri pada tahun 1949(Raditio, 2019, p. 49). Salah satu sengketa perbatasan negara yang dialami oleh RRC adalah sengketa perbatasan di Laut China Selatan (LCS). Sebelum membahas lebih lanjut perihal posisi RRC di LCS, penulis akan menjelaskan apa yang melatarbelakangi kawasan LCS diperebutkan oleh banyak negara khususnya oleh RRC. Secara geografis, LCS berfungsi sebagai penghubung antara Samudra Pasifik Barat dan Samudra Hindia, yang merupakan penghubung rute perdagangan internasional. LCS juga dikelilingi oleh beberapa selat seperti, Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar. Lebih dari setengah tonase armada dagang dalam setahun melewati LCS, dan sepertiga dari semua lalu lintas maritim di seluruh dunia melalui LCS(*South China Sea*, 2013, p. 8). Minyak menjadi komoditi yang sering melalui LCS. Minyak yang diangkut melalui Selat Malaka dari Samudera Hindia, menuju Asia Timur melalui Laut Cina Selatan, tiga kali lipat dari jumlah yang melewati Terusan Suez dan lima belas kali lipat jumlah yang transit di Terusan Panama. Sekitar dua pertiga pasokan energi Korea Selatan, hampir 60 persen pasokan energi Jepang dan Taiwan, dan 80 persen impor minyak mentah RRC datang melalui Laut China Selatan(Kaplan, 2014, p. 23). Selain sentralitas lokasi, Laut Cina Selatan juga memiliki cadangan minyak yang banyak, diperkirakan cadangan minyak di LCS berjumlah tujuh miliar barel, selain itu di LCS pun terdapat gas alam yang diperkirakan sebanyak 900 triliun kaki kubik. Jika perhitungan RRC benar bahwa Laut Cina Selatan pada akhirnya dapat menghasilkan 130 miliar barel minyak, maka Laut Cina Selatan mengandung lebih banyak minyak daripada wilayah mana pun di dunia (kecuali Arab Saudi). Beberapa pengamat RRC menyebut Laut China Selatan sebagai “Teluk Persia kedua”(Snyder, 1996, p. 3).

Jika memang benar ada begitu banyak minyak di Laut China Selatan, maka RRC akan mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka untuk kebutuhan energinya yang berasal dari Timur Tengah. Perusahaan Minyak Lepas Pantai Nasional RRC telah menginvestasikan 20 miliar dolar AS agar dapat mengeksplorasi minyak yang terdapat di Laut China Selatan(Kaplan, 2014, p. 23). RRC sangat membutuhkan energi baru, hal ini dikarenakan besarnya kebutuhan industri dalam negeri RRC untuk peningkatan dan memperkuat ekonomi nasional. Mengingat cadangan minyak yang dimiliki RRC hanya menyumbang 1,1 persen dari total dunia, sementara itu RRC mengkonsumsi lebih dari 10 persen produksi minyak dunia dan lebih dari 20 persen dari semua energi yang dikonsumsi di dunia

ini(Higgins, 2011). Hal ini tidak memenuhi kebutuhan industri dalam negeri RRC. Selain minyak dan gas alam, Laut China Selatan juga dikenal dengan kawasan yang memiliki ratusan pulau kecil dan kekayaan alam bawah laut yang melimpah seperti, bebatuan bawah laut dan terumbu karang(Kaplan, 2014, p. 24).

Pentingnya LCS bagi kepentingan nasional RRC mengharuskan RRC membuat langkah-langkah yang mengindikasikan bahwa LCS adalah milik RRC. Langkah pertama RRC pada konteks Laut China Selatan adalah ketika RRC membuat *Declaration on China's Territorial Sea* pada 9 September 1958. Ini menjadi awal klaim RRC di LCS(Dupuy & Dupuy, 2013, p. 126). *Declaration on China's Territorial Sea* menegaskan("Declaration of the Government of the People's Republic of China on China's Territorial Sea," 1958): ***"Lebar laut teritorial Republik Rakyat RRC adalah dua belas mil laut. Ketentuan ini berlaku untuk semua wilayah Republik Rakyat RRC termasuk daratan RRC dan pulau-pulau pesisirnya, serta Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya, Kepulauan Penghu, Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha, Kepulauan Nansha dan semua pulau lain milik RRC yang dipisahkan dari daratan dan pulau-pulau pesisirnya oleh laut lepas."***

Klaim RRC ini ditegaskan kembali pada 25 Februari 1992 ketika RRC mengumumkan UU Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Pasal 2 pada UU tersebut mengatur bahwa(Raditio, 2019, p. 50): ***"Wilayah daratan Republik Rakyat RRC meliputi daratan Republik Rakyat RRC dan pulau-pulau pesisirnya: Taiwan dan semua pulau yang termasuk di dalamnya, termasuk Kepulauan Diaoyu; Kepulauan Penghu; Kepulauan Dongsha; Kepulauan Xisha; Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha; serta pulau-pulau lain milik Republik Rakyat RRC."***

Lalu pada 26 Juni 1998, RRC mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Pengumuman ZEE dan Landas Kontinen yang dilakukan oleh RRC ini merupakan klaim pertama RRC terhadap perbatasan yang dilandasi sejarah(Dupuy & Dupuy, 2013, pp. 127-128). Secara internasional, RRC membuat klaimnya di LCS melalui korespondensi diplomatik dalam serangkaian acara dalam skala internasional. Pada tanggal 7 Mei 2009 contohnya, RRC mengirimkan nota verbale (no. CML/17/2009) kepada Sekretaris Jenderal PBB. Ini adalah reaksi atas *joint-submission* yang dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam kepada Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen perihal LCS. Dalam note verbale ini, RRC menegaskan bahwa("Chinese Note Verbale to the United Nations Secretary General No. CML/8/2011," 2011): ***"RRC memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan yang relevan serta dasar laut dan tanah di dalamnya (lihat peta terlampir). Posisi di atas secara konsisten dipegang oleh Pemerintah RRC dan dikenal luas oleh dunia internasional."***

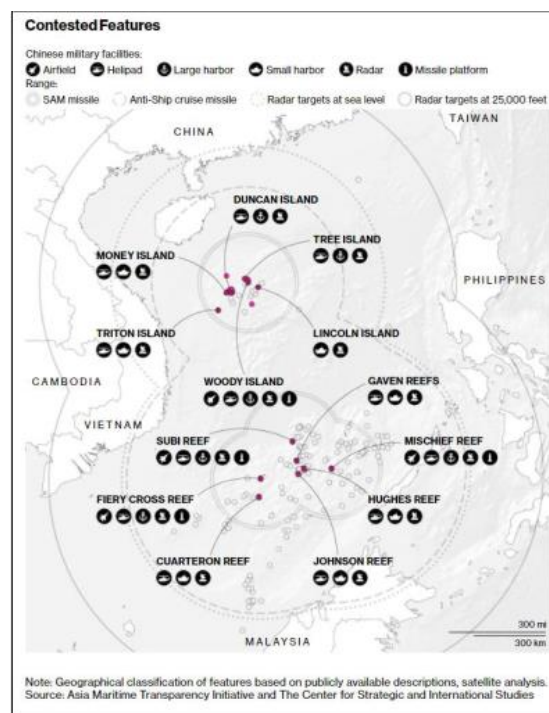
Dalam dokumen ini, RRC membuat peta dengan sembilan garis putus-putus dikenal secara internasional dengan sebutan *Nine Dash Line* (NDL) (kembali lihat **Gambar 1**). Peta (NDL) tersebut berusaha untuk menunjukkan wilayah di mana RRC memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi di LCS. Korespondensi diplomatik RRC China selanjutnya adalah untuk menegaskan klaimnya di LCS pada 14 April 2011. *Note verbale* lebih lanjut ini dibuat sebagai tanggapan atas protes Filipina terhadap note RRC pada 2011. Isi dari *note verbale* hampir serupa dengan *note verbale* sebelumnya (CML/17/2009), dengan tambahan kalimat yang menegaskan bahwa RRC memiliki kedaulatan dan hak terkait yurisdiksi di LCS yang didukung oleh bukti sejarah dan hukum(Y. Sun, 2012). Pernyataan ini menjadi pernyataan yang sering diucapkan oleh pemerintah RRC ketika berhadapan dengan klaim RRC di LCS.

Klaim RRC di LCS secara internasional berlanjut ketika Filipina melakukan proses arbitrase terhadap klaim RRC. Sebagai tanggapan, pada tanggal 7 Desember 2014, RRC menerbitkan *Position Paper* tentang masalah yurisdiksi di Arbitrase LCS yang diprakarsai oleh Filipina. Dalam *Position Paper* tersebut RRC berargumen bahwa subyek arbitrase adalah kedaulatan teritorial yang berada di luar yurisdiksi UNCLOS("Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines," 2014). Karena *Annex VII* UNCLOS menyatakan bahwa UNCLOS tidak memiliki yurisdiksi atas masalah



kedaulatan, RRC menolak untuk menerima dan berpartisipasi dalam arbitrase yang diprakarsai oleh Filipina. *Position Paper* juga menegaskan ("Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines," 2014): ***"Bahwa RRC memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas kepulauan di LCS (Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha) dan perairan yang berdekatan. Aktivitas RRC di LCS sudah ada sejak lebih dari 2.000 tahun yang lalu. RRC adalah negara pertama yang menemukan, memberi nama, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya pulau-pulau di LCS dan yang pertama terus-menerus menjalankan kekuasaan berdaulat atas pulau-pulau tersebut."***

Secara singkat, klaim RRC di LCS dapat diringkas sebagai berikut, RRC mengklaim semua wilayah daratan di LCS. Wilayah daratan tersebut dibagi menjadi empat kelompok, Kepulauan Dongsha (Pratas), Kepulauan Xisha (Paracel), Kepulauan Zhongsha (Macclesfield Bank), dan Kepulauan Nansha (Spratlys). Selanjutnya RRC mengklaim semua pulau di LCS dan perairan sekitarnya berdasarkan hak historis. Selain melakukan korespondensi diplomatik, RRC juga melakukan langkah-langkah militeristik untuk mempertahankan kedaulatannya di LCS. Hal ini tidak terlepas karena ada 5 negara lainnya yang juga melakukan klaim untuk seluruh atau sebagian kepulauan Spratly dan Paracel dan ruang maritim dan sekitarnya, negara-negara tersebut yaitu, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, dari 5 negara klaim di LCS kecuali Brunei mempertahankan kehadiran militer di satu pulau atau lebih (Schofield, 2009, p. 11).



Gambar 2. Peta Fasilitas Militer China di LCS (Sumber: Leigh, Martin, & Leung, 2020)

Langkah-langkah militeristik yang dilakukan RRC untuk mempertahankan dan menunjukkan eksistensinya di LCS adalah dengan melakukan pembangunan di LCS. RRC melakukan reklamasi pulau dan pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Reklamasi dan pembangunan pangkalan militer RRC di LCS dimulai pada Desember 2013 dan baru dilaporkan secara publik pada Mei 2014 (Rapp-Hooper, 2015). Pembangunan reklamasi dan konstruksi lahan ekstensif yang dilakukan oleh RRC bertempat di beberapa terumbu karang di rantai pulau Spratly di bagian selatan LCS, lokasi terumbu karang yang dimaksud yaitu, Terumbu Cuarteron, Terumbu Fiery Cross, Terumbu Gaven, Terumbu Hughes, Terumbu Johnson Selatan, Terumbu Mischief, dan Terumbu Subi (Dolven, Elsea, Lawrence, O'Rourke, & Rinehart, 2015, p. 1). Pada **Gambar 2** menunjukkan hasil pembangunan fasilitas militer yang dilakukan oleh RRC di beberapa lokasi di LCS. Hasil pembangunan

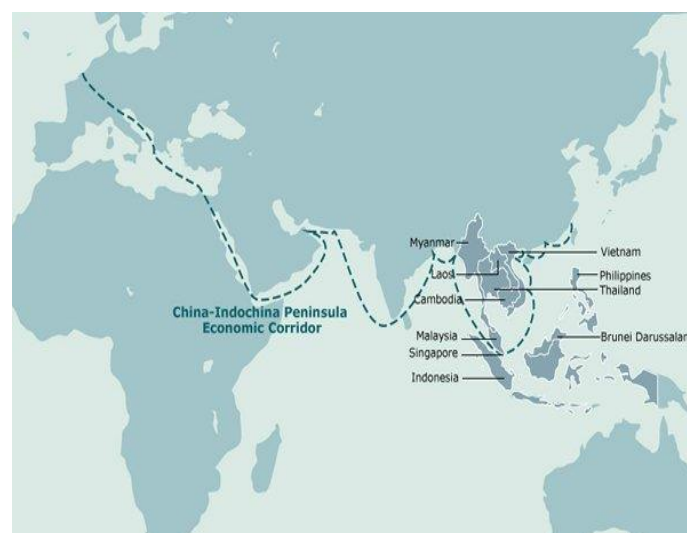
fasilitas militer yang dilakukan RRC adalah terbangunnya lapangan terbang (untuk kepentingan angkatan udara RRC), pembangunan rudal dan radar, pelabuhan, fasilitas-fasilitas militer ini dibangun di 3.200 hektar lahan reklamasi (Leigh, Martin, & Leung, 2020).

#### 4.2 *Belt and Road Initiative (BRI).*

Aktivitas RRC selanjutnya di Asia Tenggara adalah inisiasi *Belt and Road Initiative* (BRI). Pendekatan inisiasi BRI sangat bertolak belakang dengan pendekatan RRC di LCS yang sangat agresif. Pada konteks BRI, pendekatan yang dilakukan oleh RRC bersifat persuasif dengan tujuan akhir terciptanya kerjasama kawasan. BRI menawarkan pembangunan infrastruktur transportasi, baik transportasi darat maupun laut. Tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk memperlancar arus perdagangan antara RRC dengan kawasan lain seperti, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika. RRC juga menekankan kerja sama ekonomi dalam kerangka BRI melalui peningkatan hubungan dagang yang mengarah pada liberalisasi perdagangan antar aktor yang terlibat seperti pengurangan hambatan dagang, hingga membentuk blok perdagangan baru (Suropati et al., 2016, p. 113).

Inisiasi BRI adalah upaya RRC untuk mengembalikan kejayaan rute perdagangan Jalur Sutra. Pada awalnya, Jalur Sutra digunakan untuk menggambarkan jalur perdagangan darat sebelum zaman modern di Eropa. Jalur tersebut dimulai dari RRC dan meluas sampai ke Eropa (Lei, 2018, p. 1). Lambat laun, Jalur Sutra menjadi nama untuk jalur perdagangan kompleks yang terdiri dari pelabuhan, pos perdagangan, komoditas, ide, budaya, wilayah, dan etnis di sepanjang jalur. Jalur Sutra juga dijadikan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan beberapa rute perdagangan antara Eropa dan Asia, termasuk Rute Oasis yang melintasi gurun di Timur Tengah, ditambah Rute Maritim, Rute Stepa dan Rute Barat Daya (Lei, 2018, pp. 1-2).

Seperti halnya jalur sutra pada masa lalu, BRI juga memiliki dua jalur, maritim dan darat, di mana China ingin mengintegrasikan jalur pelayaran maritim dengan jalur perdagangan darat (*Belt and Road*). Terdapat 6 jalur perdagangan pada Jalur Sutra modern, *China-Indochina Peninsular Economic Corridor* (CIPEC) adalah salah satunya. CIPEC merupakan jalur BRI yang melewati negara-negara di Asia Tenggara (Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia) ("China-Indochina Peninsula Economic Corridor," 2017). CIPEC dimulai dari *China's Pearl River Delta* ke arah barat sepanjang Jalur Ekspres Nanchong-Guang dan Jalur Kereta Api Berkecepatan Tinggi Nanning-Guangzhou melalui Nanning dan Pingxiang ke Hanoi (Vietnam) dan Singapura (Lihat **Gambar 3**). Jembatan darat ini menghubungkan China dengan Semenanjung Indochina yang melintasi Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia ("China-Indochina Peninsula Economic Corridor," 2017).



Gambar 3. Jalur China-Indochina Peninsular Economic Corridor Sumber: HKTDC, (2015)



Selanjutnya, kehadiran BRI di kawasan-kawasan tersebut diharapkan dapat membangun sebuah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terbentuk melalui regionalisme yang diwujudkan dengan kepentingan komunitas (*interest-group*) yang sama. Kepentingan tersebut diprioritaskan pada pembentukan jaringan ekonomi terpadu antar negara yang ikut serta dalam inisiasi tersebut (Suropati et al., 2016, p. 112). BRI akan membuka peluang bagi RRC untuk memperluas dan memperbanyak kerjasama ke bidang-bidang lain, seperti politik dan pertahanan. Intinya, RRC ingin membagi kue ekonomi yang selama ini dinikmati sendiri dengan negara lain agar dapat mempererat hubungan bilateral di bidang politik dan pertahanan. BRI sendiri memiliki fokus pada lima tujuan utama, yaitu (Suropati et al., 2016, p. 114);

1. *Policy coordination*, artinya BRI bertujuan untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan proyek tersebut;
2. *Cultural exchange*, ini menjadi tujuan untuk mempromosikan ikatan *people to people* yang bersahabat yang akan menciptakan pemahaman budaya yang lebih dalam;
3. *Economy integration*, BRI dirancang untuk meningkatkan kerjasama moneter dan keuangan saat memantau dan menangani risiko serta interaksi keuangan secara umum. Selain itu, untuk memperluas pertukaran mata uang dan ruang lingkup;
4. *Trade and Investment*, melalui investasi dan perdagangan lintas batas BRI ditujukan untuk mempermudah dan membuat kerjasama perdagangan dan investasi antar negara di Jalur Sutra, mempromosikan integrasi ekonomi;
5. *Connecting infrastructure*, fokus pada fasilitas infrastruktur yang memungkinkan konektivitas yang lebih besar antara negara-negara yang di lalui Jalur Sutra, misalnya pembangunan kembali dan pengembangan pelabuhan, penghilangan hambatan, memperbaiki jalan dll. Serta menciptakan jaringan yang lebih baik melalui pengembangan jalan raya, jalur kereta api dan jalur serat optik antar negara di sepanjang Jalur Sutra.

Proyek investasi BRI diperkirakan telah membantu sebanyak US\$1 triliun untuk pembangunan infrastruktur asing selama periode 10 tahun yang dimulai sejak tahun 2017 (*China's new silk route: The long and winding road*, 2016, p. 4). Untuk menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur pada proyek BRI, RRC membuat lembaga seperti *Silk Road Fund*, yang dimana sebagian besar pendanaan RRC untuk proyek-proyek ini berasal dari pembangunan yang diarahkan oleh negara dan bank-bank komersial. RRC juga mendukung pendekatan multilateral untuk investasi termasuk *Multilateral Development Banks* (MDB) dan kemitraan swasta-publik (*China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape*, 2018, p. 3). Secara geografis BRI mencakup wilayah yang sangat luas. Setidaknya ada 65 negara yang terhubung, mencakup lebih dari setengah populasi dunia (4,4 miliar jiwa), sekitar 30% dari ekonomi global, dan total kebutuhan investasi untuk pembangunan mencapai US\$5 triliun (*China's new silk route: The long and winding road*, 2016, p. 5).

#### **4.3 LCS & BRI bagi Kepentingan RRC di Asia Tenggara**

Terlepas dari kerjasama dan konflik RRC di Asia Tenggara fakta bahwa Laut China Selatan (LCS) dan Jalur Sutra (BRI) memiliki peran penting bagi kepentingan nasional RRC. Berdasarkan penemuan dan analisa pada sub sebelumnya, LCS dan BRI sama-sama memiliki nilai strategis secara geopolitik dan ekonomi, yang menguntungkan bagi RRC. LCS dan BRI merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis karena menghubungkan banyak kawasan dan juga banyak negara, hal ini akan mempengaruhi strategi pembangunan jangka panjang dan kebijakan luar negeri RRC yang dimana akan menempatkan jalur-jalur perdagangan yang ada di BRI dan LCS sebagai indikator dalam pengambilan sebuah kebijakan (*China's new silk route: The long and winding road*, 2016, p. 4). Selain itu, kawasan LCS dan BRI juga dipenuhi dengan SDA yang melimpah, maka dari itu aksesibilitas SDA akan menjadi lebih terjangkau apabila RRC mampu mempertahankan kepentingannya di wilayah tersebut melalui klaim di LCS dan pembangunan infrastruktur di Jalur Sutra melalui BRI.

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa secara geopolitik dan geoeкономи LCS memiliki potensi yang besar bagi siapa saja yang dapat menguasainya. LCS memiliki nilai strategis karena letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu

kawasan LCS ini juga berdekatan dengan banyak Selat, terutama Selat Malaka yang dikenal sebagai Selat yang sangat sibuk akan aktivitas lalu lintas lautnya. Selain itu LCS pun memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena terdapat sumber minyak, gas alam yang melimpah, dan kekayaan sumber daya laut, serta ratusan pulau kecil di dalamnya. Menjadi sangat logis apa yang menjadi kepentingan RRC pada kawasan ini. Posisi RRC di kawasan ini tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yaitu modernisasi dan pembangunan dalam negeri. Nilai strategis secara geografi dan ekonomi yang dimiliki LCS dapat membantu RRC mencapai kepentingan tersebut.

Reklamasi dan pembangunan fasilitas militer, dan langkah-langkah diplomatis yang dilakukan oleh RRC di LCS tidak hanya bertujuan untuk mengamankan klaim RRC di LCS, tetapi juga sebuah cara RRC untuk memberi label pada kawasan LCS, agar terbentuk konstruksi sosial pada level internasional bahwa identitas LCS yang dirproyeksikan dan dirpersepsikan adalah LCS yang merupakan bagian dari kedaulatan RRC, sehingga melegitimasi dan menjustifikasi segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh RRC termasuk klaimnya di kawasan tersebut. LCS merupakan kawasan penting bagi kepentingan nasional RRC baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. Seperti pendapat Klaus Dodds bahwa geopolitik merupakan panduan untuk memberi label dengan menggunakan deskripsi geografis, metafora, maupun kerangka tertentu terhadap suatu wilayah atau tempat (Dodds, 2007, hal. 4), RRC juga mencoba untuk memberi label terhadap Jalur Sutera sebagai jalur perdagangan milik mereka, dimana RRC merupakan negara inisiator sekaligus negara donor atas terbentuknya Jalur Sutera tersebut (BRI) belum lagi fakta sejarah yang ditunjukkan RRC bahwa Jalur Sutera adalah milik mereka. Kontribusi yang besar yang dilakukan RRC untuk menciptakan integrasi ekonomi melalui BRI membuat RRC akan menjadi aktor yang sangat berpengaruh di kawasan-kawasan yang dilewati Jalur Sutra (BRI), khususnya Asia Tenggara. Hingga pada akhirnya pengaruh tersebut membentuk identitas Jalur Sutra (Jalur BRI) sebagai jalur perdagangan RRC, seperti halnya kejayaan masa lalu RRC pada Jalur Sutera Kuno. RRC ingin memberikan *statement* bahwa RRC memiliki kuasa pada jalur wilayah tersebut.

## 5. Kesimpulan

Asia Tenggara memiliki arti penting bagi kepentingan nasional RRC. Strategisnya lokasi, SDA, dan negara-negara yang berada pada kawasan itu memiliki potensi untuk memenuhi kepentingan nasional RRC. Fakta-fakta tersebut menjelaskan tingginya aktivitas RRC di kawasan tersebut. RRC memiliki hubungan yang unik dengan kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, RRC memiliki hubungan kerjasama dan konflik pada waktu yang bersamaan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama bilateral maupun multilateral antara RRC dengan negara-negara Asia Tenggara baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya (salah satunya adalah *Belt and Road Initiatives*) memiliki banyak nilai positif bagi kedua belah pihak dan diproyeksikan akan berlangsung untuk waktu jangka panjang. Namun, meskipun memiliki hubungan kerjasama yang baik, RRC juga memiliki konflik dengan negara-negara salah satunya adalah sengketa perbatasan di Laut China Selatan. Hubungan unik antara RRC dan negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwasanya hubungan baik/kerjasama tidak menjadi jaminan terhindarnya sebuah konflik, dan sebaliknya. Pada akhirnya negara akan melakukan pilihan rasional yang membuahkan *output* sebuah keputusan atau kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan nasionalnya, baik melalui kerjasama ataupun konflik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kontradiksi dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh RRC di kawasan Asia Tenggara.

## Referensi

- ASEAN. (2021, Oktober 1). *Our Communities*. Dipetik Oktober 1, 2021, dari ASEAN: <https://asean.org/our-communities>
- ASEAN. (2021, September 28). *Tentang ASEAN*. Dipetik September 28, 2021, dari Sekretariat Nasional ASEAN: <http://setnas-asean.id/tentang-asean>
- Asean-China Center. (2020, Maret 13). *ASEAN-China Relations*. Dipetik September 28, 2021, dari Asean-China Center: <http://www.asean-china-center.org/english/2020-03/4613.html>

- ASEAN-China Centre. (2013, Oktober 3). *Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament*. Dipetik Oktober 5, 2021, dari ASEAN-China Centre: [http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c\\_133062675.htm](http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm)
- CFR. (2020). *Timeline: China's Maritime Disputes 1895 – 2020*. Dipetik Oktober 7, 2021, dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>
- China Focus. (1958, September 4). *Declaration of the Government of the People's Republic of China on China's Territorial Sea*. Dipetik Oktober 5, 2021, dari China Focus: <https://www.chinausfocus.com/upload/file/2014/Annex1-4.pdf>
- China.org. (2017, April 19). *China-Indochina Peninsula Economic Corridor*. Dipetik Oktober 5, 2021, dari China.org: [http://www.china.org.cn/english/china\\_key\\_words/2017-04/19/content\\_40651903.htm](http://www.china.org.cn/english/china_key_words/2017-04/19/content_40651903.htm)
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Darmawan, A. R. (2021, Oktober 6). *ASEAN's dilemma in the South China Sea: Can the regional organisation be useful in such a heated dispute?* Dipetik November 10, 2021, dari Policy Forum: <https://www.policyforum.net/aseans-dilemma-in-the-south-china-sea/>
- Dodds, K. (2007). *Geopolitics: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Dolven, B., Elsea, J. K., Lawrence, S. V., O'Rourke, R., & Rinehart, I. E. (2015). *Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options*. Washington D.C: Congressional Research Service.
- Dupuy, F., & Dupuy, P. M. (2013). A Legal Analysis of China's Historical Rights Claim in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 124–141. doi:10.5305/amerjintlaw.107.1.0124
- Esplanada, J. E. (2011, April 15). *PH runs to UN to protest China's '9-dash line' Spratlys claim*. Dipetik Oktober 10, 2021, dari Inquire.Net: <https://newsinfo.inquirer.net/3219/ph-runs-to-un-to-protest-china%E2%80%99s%E2%80%999s%E2%80%999s-dash-line%E2%80%999s-spratlys-claim>
- Flin, C. (2006). *Introduction to Geopolitics*. New York: Routledge Press.
- Higgins, A. (2011, September 17). *In South China Sea, a dispute over energy*. Dipetik November 9, 2021, dari Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/in-south-china-sea-a-dispute-over-energy/2011/09/07/gIQA0PrQaK\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/in-south-china-sea-a-dispute-over-energy/2011/09/07/gIQA0PrQaK_story.html)
- HKTDC. (2015, September 30). *The ASEAN Link in China's Belt and Road Initiative*. Dipetik Oktober 11, 2021, dari Hong Kong Means Business: <https://hkmb.hktdc.com/en/1X0A3UUO/hktdc-research/The-ASEAN-Link-in-China%E2%80%99s-Belt-and-Road-Initiative>
- Hoskin, M. (2019, Agustus 10). *Historical Support for China's South China Sea Territorial Stance*. Dipetik Oktober 7, 2021, dari Maritime Executive: <https://www.maritime-executive.com/editorials/historical-support-for-china-s-south-china-sea-territorial-stance-1>
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House.
- Keo, B. Z. (2020). Crossing the River by Feeling the Stones: Deng Xiaoping in the Making of Modern China. *Education About Asia*, 33-41.
- Lei, Z. (2018). *The Political Economy of China's Belt and Road Initiative*. Shanghai: World Scientific.
- Leigh, K., Martin, P., & Leung, A. (2020, Desember 17). *Troubled Waters: Where the U.S. and China Could Clash in the South China Sea*. Diambil kembali dari Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/graphics/2020-south-china-sea-miscalculation/>
- Lumbanrau, R. E., & Kusumadewi, A. (2016, Juni 23). *Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit*. Dipetik Oktober 7, 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit>
- Massey, D. (2006). Place Characteristic. Dalam C. Flint, *Introduction to Geopolitics* (hal. 8-9). New York: Routledge.
- Morgenthau, H. (1952). "Another "Great Debate": The National Interest of the United State. *The American Political Science Review*, 46(4), 961-988.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266.

- OECD. (2018). *China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape*. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/bus\_fin\_out-2018-6-en
- People's Republic of China. (2014, Desember 7). *Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines*. Dipetik November 15, 2021, dari Foreign Minister People's Republic of China: [https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/snhwtlwcwj\\_1/201606/t20160602\\_8527277.htm](https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/snhwtlwcwj_1/201606/t20160602_8527277.htm)
- PWC. (2016). *China's new silk route: The long and winding road*. London: PWC. Diambil kembali dari <https://www.pwc.com/gx/en/growth-markets-center/assets/pdf/china-new-silk-route.pdf>
- Raditio, K. H. (2019). *China's Claim in the South China Sea* (1st ed.). Singapura: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-981-13-1283-0
- Rapp-Hooper, M. (2015, Februari 18). *Before and After: The South China Sea Transformed*. Diambil kembali dari Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/before-and-after-the-south-china-sea-transformed/>
- Robert L. Worden, Savada, A. M., & Dolan, R. E. (1987). *China*. Dipetik Agustus 5, 2021, dari Country Studies: <http://countrystudies.us/china/92.htm>
- Schofield, C. (2009). Dangerous Ground: A geopolitical overview of the South China Sea. Dalam S. Bateman, & R. Emmers, *Security and International Politics in the South China Sea: Towards a cooperative management regime*. (hal. 1-25). Oxon: Routledge.
- Shenkar, O. (2005). *The Chinese Century: The rising Chinese Economy and Its Impact on the Global Economy, and the Balance of Power, and Your Job*. Texas: Wharton University Press.
- Snyder, S. (1996). *The South China Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy*. Washington DC: U.S. Institute of Peace.
- Sun, P., & Heshmati, A. (2010). International Trade and its Effects on Economic Growth in China. *IZA Discussion Paper Series 5151*, 1-33.
- Sun, Y. (2012). Studying the South China Sea: The Chinese Perspective. *Center for a New American Security*, 1-11.
- Sung, Y. W. (1991). *The China-Hong Kong Connection: The Key to China's Open Door Policy*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511552298
- Suropati, U., Sulaiman, Y., & Montratama, I. (2016). *Arungi Samudera Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke 21*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- U.S. Energy Information Administration. (2013). *South China Sea*. United States: U.S. Energy Information Administration. Dipetik November 8, 2021, dari [https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South\\_China\\_Sea](https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea)
- United Nations. (2011, Agustus). *Chinese Note Verbale to the United Nations Secretary General No. CML/8/2011*. Dipetik November 5, 2021, dari United Nations: [http://www.un.org/Depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/mysvnm33\\_09/chn\\_2011\\_re\\_ph1\\_e.pdf](http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2011_re_ph1_e.pdf)
- Wahyudi, H., & Ayunindien, Q. (2022). Globalisasi Sosial Berpengaruh Negatif bagi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 1-11.
- Wasserstrom, J. N. (2010). *China in the 21st Century: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press.